



► DAMPAK KENAIKAN BBM

Pemkot Siapkan Evaluasi Anggaran

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari evaluasi anggaran, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, hingga operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Raden Roro Andarini, menurunkan jajarannya saat ini tengah menghitung dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap kemampuan anggaran daerah. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan langkah efisiensi tambahan.

"Kalau hasil perhitungan menunjukkan kondisi cukup berat, kemungkinan akan dilakukan efisiensi lagi. Tetapi kalau masih mampu, kebijakan yang ada saat ini akan tetap digunakan," katanya saat ditemui, Kamis (11/6).

Andarini menuturkan, pembatasan penggunaan BBM kendaraan dinas telah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu. Kendaraan dinas roda empat yang tidak digunakan untuk pelayanan publik dibatasi maksimal 20 liter per pekan, sedangkan kendaraan roda dua maksimal empat liter per pekan.

Transisi Energi

Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, mengatakan dampak kenaikan BBM harus direspons cepat agar tidak memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, Pemkot Jogja telah melakukan langkah antisipasi melalui kebijakan efisiensi anggaran sejak awal

- Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan langkah efisiensi tambahan.
- Pemangkasan anggaran mampu mengurangi tekanan terhadap keuangan daerah akibat kenaikan harga BBM.

tahun. Salah satunya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50% dan meniadakan perjalanan dinas luar negeri. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi tekanan terhadap keuangan daerah akibat kenaikan harga BBM.

"Anggaran perjalanan dinas sudah diturunkan, bahkan perjalanan luar negeri tidak dilakukan. Jadi, dampak kenaikan BBM ini relatif sudah kami antisipasi melalui efisiensi yang dilakukan sebelumnya," ujarnya.

Meski demikian, Pemkot tetap akan mengevaluasi kembali anggaran perjalanan dinas dan bahan bakar untuk memastikan kemampuan keuangan daerah tetap terjaga di tengah kenaikan harga energi. Wawan menyebut penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program transisi energi melalui gerakan Jogja Bersinar juga akan terus diperkuat.

Selain itu, Pemkot Jogja membuka peluang mendorong penggunaan transportasi publik, sepeda, maupun kendaraan non-fosil bagi aparat sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.

Di sektor ekonomi, Wawan menegaskan pengendalian dampak kenaikan BBM tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Pemkot akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan dan pelaku usaha, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dukungan dan stimulus bagi usaha kecil dan menengah (UKM) juga tengah dipertimbangkan mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian Kota Jogja.



Wawan Harmawan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005